

Penulis:

Michael Alexander

Afiliasi:

GKI Darmo Satelit

Korespondensi:

luxuryours@yahoo.com

© MICHAEL
ALEXANDERDOI: 10.21460/gema.
2021.62.436This work is licenced
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International Licence.

PUBLIC SPHERE AND THE INTEGRALISTIC PARADIGM

From Communicative Interaction to the Implementation of an Encounter-Based Curriculum

Abstract

The public sphere is a meeting space. Various identities meet and interact. Each carries its pattern: instrumental-hierarchical, strategic-monological, or mutual-communicative. Equality in the last pattern is the basis for building relationships that are oriented towards realizing common goals which are formulated from the synthesis of ideas. This research shows that there is a gap between the idea of inter-particularities equality and the tendency of the respondents to prioritize group identities over efforts to create common welfare. This gap can be traced back to the design of the lectionary sermon which found a lack of discussion on the themes of the public space. Therefore, the author proposes an alternative paradigmatic model that integrates all personal dimensions into the global-public dimension. A participatory approach that raises experiences in the context of community life is used as a starting point to mobilize the active participation of the people in testing the sermons relevance in the public space.

Keywords: public space, mutuality, identity, common welfare, integrative paradigm.

RUANG PUBLIK DAN PARADIGMA PENDIDIKAN INTEGRALISTIK

Dari Interaksi Komunikatif Menuju Implementasi Kurikulum Berbasis Perjumpaan

Abstrak

Ruang publik merupakan ruang perjumpaan. Berbagai identitas bertemu dan berinteraksi. Masing-masing membawa polanya: instrumental-

hierarkis, strategis-monologis, atau mutual-komunikatif. Kesetaraan dalam pola terakhir merupakan dasar untuk menjalin relasi yang berorientasi pada upaya mewujudkan tujuan bersama yang dirumuskan dari sintesa gagasan-gagasan. Penelitian ini menunjukkan terdapatnya kesenjangan antara gagasan kesetaraan antartpartikularitas dengan kecenderungan umat responden yang mengutamakan identitas kelompok di atas upaya mewujudkan kemaslahatan bersama. Kesenjangan tersebut selanjutnya dirunut kembali pada rancangan khotbah leksionari dan dijumpai minimnya pembahasan mengenai tema-tema ruang publik. Oleh sebab itu, penulis mengusulkan sebuah model paradigmatik alternatif yang mengintegrasikan seluruh dimensi personal ke dalam dimensi publik-global. Pendekatan partisipatori yang mengangkat pengalaman dalam konteks hidup bermasyarakat dipergunakan sebagai titik tolak guna memobilisir partisipasi aktif umat dalam mengujicobakan relevansi berita mimbar di ruang publik.

Kata-kata kunci: ruang publik, kesetaraan, identitas, kemaslahatan bersama, paradigma integralistik.

PENDAHULUAN

Identitas di ruang publik merupakan keniscayaan sekaligus memunculkan ketegangan di masyarakat. Niscaya karena kehidupan di era globalisasi mempertemukan berbagai identitas sosio-kultural di ruang kehidupan. Secara natural identitas melekat pada setiap entitas yang saling berjumpa itu. Keunikan masing-masing pihak memberikan warna dan kesempatan-kesempatan baru. Pasar merupakan contoh empiris dari perjumpaan konstruktif di ruang publik. Akan tetapi perjumpaan antarentitas sosial tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat berbagai kepentingan yang melekat pada individu maupun kelompok. Pertentangan kepentingan membawa potensi konflik. Terlebih jika kepentingan tersebut dilekatkan pada dogma kolektif tertentu. Sebutlah isu keagamaan. Maka konflik memiliki peluang besar untuk menyebar luas dan bersifat destruktif. Konflik di Ambon pada tahun 1999 merupakan contoh konflik yang terjadi karena jalinan kepentingan dengan dogma keagamaan (Sapsuha 2013, 97–8).

Model penataan ruang publik di era lampau mengurung berbagai identitas ke dalam ruang privat. Pada masa Orde Baru cara represif yang dipergunakan. Potensi kekerasan sosial dicegah melalui kontrol militeristik (Hefner 2007, 64–9). Pasca tumbangnya rezim tersebut, berbagai entitas tampil ke permukaan dan berupaya untuk menguasai ruang publik. Politik identitas semakin mengemuka dan berbagai benturan tidak terhindarkan. Kekerasan kolektif berbasis agama yang didukung akar rumput secara masif menunjukkan religiusitas memiliki pengaruh kuat di ruang publik Indonesia. Oleh karena itu penataan ruang publik perlu memperhatikan keragaman bentuk-bentuk etno-religiusitas. Penataan ruang publik dapat dilakukan melalui deliberasi formal maupun interaksi informal. Politik pengakuan yang dirumuskan Charles Taylor merupakan salah satu cara untuk menata keragaman secara formal (Gutmann 1994, 5–12). Dalam gagasan yang dikemukakan Taylor sebagaimana dipaparkan Gutmann, setiap entitas sosial tidak direduksi

pada kepentingan universal yang melampaui partikularitas-partikularitas, yakni *common good*, namun diakui keberadaannya yang unik di ruang publik:

Human identity is created, as Taylor puts it, dialogically, in response to our relations, including our actual dialogues, with others... If human identity is created and constituted, then public recognition of our identity requires a politics that leaves room for us to deliberate publicly about those aspects of our identity we share, or potentially share, with other citizens. A society that recognize individual identity will be a deliberative, democratic society because individual identity is partly constitute by collective dialogues (Gutmann 1994, 7).

Kutipan di atas menunjukkan pengakuan kesetaraan politik tiap partikularitas merupakan prasyarat terjadinya proses deliberasi di ruang publik. Terlepas dari perdebatan pada detail serta tanggapan yang diberikan Jürgen Habermas, kedua pemikir sepakat akan perlunya proses deliberasi sebagai bentuk partisipasi warga di ruang publik (Habermas 1994, 107–148).

Berkebalikan dengan gagasan ideal di atas, tulisan ini menunjukkan bahwa ide kesetaraan dan partisipasi komunikatif antarpertikularitas keagamaan belum menjadi realita dalam hidup bergereja, oleh sebab itu diperlukan alternatif model paradigmatis dalam menyusun kurikulum pembinaan anggota jemaat dan mengimplementasikannya dalam rancangan khotbah. Untuk mencapai hal tersebut: *pertama*, penulis menguraikan secara singkat pemikiran Habermas yang berpendapat bahwa diskursus antaragama merupakan sebuah kemendesakan ruang publik. Pemaparan mengerucut pada desakan Habermas agar agama-agama merumuskan dasar universal

bersama dan berpartisipasi secara aktif dalam tindakan komunikatif pewujudnyataannya. *Kedua*, penulis menyajikan data empiris yang diperoleh dari survei yang dilakukan di sebuah jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI). Hasil survei menunjukkan terdapatnya kesenjangan antara ideal yang Habermas rumuskan dengan kecenderungan alamiah jemaat responden dalam menjalin interaksi di ruang publik. *Ketiga*, penulis merunut kesenjangan tersebut pada desain kurikulum pembinaan anggota jemaat dan implementasinya dalam rancangan khotbah leksionari. Dua kriteria yang disarikan dari pemikiran Habermas dipergunakan sebagai lensa selisik untuk mencermati tujuan dari tema-tema khotbah yang muncul dalam rancangan khotbah leksionari. *Terakhir*, penulis mengusulkan sebuah model paradigmatis guna mengintegrasikan tema-tema kepublikan ke dalam penyusunan kurikulum pembinaan anggota jemaat dan implementasinya dalam rancangan khotbah leksionari.

DISKURSUS ANTARAGAMA SEBAGAI KEMENDESAKAN RUANG PUBLIK

Dalam sebuah perdebatan antara Habermas dengan Paus emeritus Joseph Ratzinger, terungkap keberhati-hatian Habermas untuk mempercayai agama sebagai kekuatan politis. Selain merupakan kekuatan kritis terhadap kekuasaan tiran dan ketidakadilan sosial, Habermas berpendapat bahwa agama juga dapat bersifat patologis. Dalam hal ini sekularisme berperan sebagai kekuatan kritis terhadap tirani religiusitas. Terlihat hubungan dialektis antara agama dengan sekularisme (Hardiman 2015, 19). Watak

ganda agama tersebut menuntut dilakukannya penataan terhadap peran publik agama dalam demokrasi kontemporer. Yang dimaksud Habermas adalah bahwa agama tidak dapat sepenuhnya menduduki fungsi pemerintahan sehingga negara dikelola secara teokratis. Oleh karena itu agama perlu diprivatisasi. Akan tetapi sebuah pemerintahan demokratis juga memerlukan legitimasi dari warga negara yang beragama. Bertolak dari sana peran publik agama dirumuskan sebagai kontributor bagi pembentukan nalar publik. Menggunakan kalimat lain, agama harus dilibatkan dalam proses penalaran publik. Di sini terlihat kesejajaran antara pemikiran Habermas dengan Rekognisi Taylor yang membuka ruang pengakuan bagi setiap partikularitas dalam masyarakat negara.

Legitimasi demokrasi bukan satu-satunya alasan Habermas mengikutsertakan agama dalam penalaran publik. Sunarko (2010, 225) mencatat bahwa Habermas menggelisahkan penipisan solidaritas yang terjadi dalam perkembangan masyarakat modern. Habermas menyatakan bahwa masyarakat berubah menjadi *monade-monade*. Istilah ini sejajar dengan masyarakat *atomic* dalam pandangan Taylor. Yang dimaksudkan adalah bahwa kelompok-kelompok masyarakat saling terisolasi antara yang satu dengan yang lain. Kelompok-kelompok tersebut selanjutnya bertindak hanya demi kepentingan kelompok bahkan mempergunakan kepentingan tersebut untuk melawan kelompok lain. Bertolak dari kondisi tersebut, Habermas menegaskan potensi agama untuk membangun solidaritas warga masyarakat. Nampak bahwa Habermas menganggap agama memiliki fungsi perekat

sosial. Tetapi bukan itu saja. Rasionalitas agama-agama juga ia akui keberadaannya.

Secara umum, gambaran tentang ruang publik demokratis adalah ruang publik di mana anggota masyarakat memiliki kehendak untuk berkomunikasi. Akan tetapi apatisme dalam keterlibatan atau partisipasi di ruang publik menyebabkan komunikasi antarentitas sosial tidak berjalan. Ragam gagasan pun tidak terlontar. Agama sebagai kekuatan kritis pengimbang pun tidak dapat menjalankan perannya. Padahal komunikasi yang setara merupakan sarana utama bagi reproduksi penalaran ruang publik (Menoh 2015a, 86). Secara singkat rasionalitas dan tindakan komunikasi merupakan prasyarat niscaya untuk menata etika perjumpaan antarpertikularitas di mana kedewasaan rasional tertanam dalam tindakan komunikatif (Menoh 2015b, 196–97).

Habermas membedakan interaksi dalam tiga bentuk: instrumental, strategis, dan komunikatif. Tindakan instrumental berkenaan dengan kerja, yakni menyangkut hubungan instrumental penguasaan atas dunia objek. Di sini hubungan bersifat hierarkis. Hubungan ini berbeda dengan interaksi komunikatif yang mengandaikan kesetaraan antarentitas sosial. Bentuk selanjutnya adalah tindakan strategis. Pendekatan ini bersifat monolog dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Dialog antaragama kerap mengikuti bentuk ini. Sedangkan bentuk ketiga dikenal sebagai tindakan komunikatif.

Tindakan komunikatif tidak meng-eksklusi kedua model lainnya. Tindakan instrumental adalah pendekatan yang lazim dalam konteksnya. Demikian pula dengan tindakan strategis yang menetapkan tujuan

interaksi di awal. Oleh sebab itu tindakan komunikatif perlu ditempatkan secara proporsional di dalam lokus partisipasi warga di ruang publik yang bertujuan untuk memobilisasi komunikasi antarentitas sosial agar tercipta saling pengertian di antara mereka. Di luar konteks politik deliberatif, pandangan yang berpendapat bahwa komunikasi bertujuan bagi komunikasi itu sendiri baru mencerminkan setengah dari konsep komunikasi Habermas, karena tindakan komunikatif pada hakikatnya bertujuan untuk menangani pluralitas pandangan moral, kultural dan keagamaan (Menoh 2015b, 195).

Tindakan komunikatif tidak berdiri sendiri namun merupakan basis epistemik bagi etika diskursus. Alih-alih membangun suatu model etika tertentu, Habermas merumuskan prosedur untuk menguji atau memeriksa norma-norma yang berlaku, apakah bersifat partikular atau universal (Menoh 2015b, 204). Yang bersifat universal dianggap Habermas mengacu pada *problem of justice*. Ia menyebutnya dengan istilah “yang moral”. Sedangkan yang partikular mengacu pada *problem of good* dan disebutnya sebagai “yang etis”. Habermas berpendapat bahwa “yang moral” memiliki prioritas di atas “yang etis” yang merupakan ranah privat-metafisik agama-agama. Sampai di sini dapat ditandaskan bahwa agama-agama harus berjumpa di ruang publik guna merembukkan gagasan-gagasan dalam diskursus mutual untuk kemudian merumuskan sintesa pemikiran berkenaan dengan upaya mewujudkan kemasyarakatan bersama. Singkatnya, perjumpaan antarentitas secara mutual di ruang publik merupakan prasyarat niscaya.

Universalitas *problem of justice* memberikan dasar bersama bagi agama-

agama untuk mengagendakan karya bersama memperjuangkan kesejahteraan lintas etnoreligiusitas. Meski demikian perlu disadari bahwa “universalitas” yang Habermas kemukakan merupakan sebuah bentuk partikularitas lain. Ia menggunakan kriteria rasionalitas (barat) sebagai prasyarat niscaya bagi agama-agama untuk merumuskan agenda bersama (Kim dkk. 2020, 41). Hal ini memunculkan kesulitan bagi agama-agama mengingat masing-masing tradisi bertolak dari landasan pembentuk rasio yang berbeda. Bahkan agama-agama memiliki pemahaman yang berbeda mengenai konsep kesejahteraan bersama (Knitter 2012, 67–71). Alih-alih bertolak dari kriteria rasionalitas universal, diskursus *ad hoc* yang berakar pada pendekatan pragmatis menyediakan jalan keluar dari kebuntuan epistemik di atas.¹ Hal ini diterapkan dengan mengangkat isu kritis yang menjadi keprihatinan bersama agama-agama pada konteks lokal tertentu. Misalnya penderitaan sebagai dasar bersama (Singgih 2016, 128–29). Secara singkat gagasan interaksi komunikatif mendorong gereja untuk bergerak dari relasi “gereja *bagi* dunia” sebagaimana umum dijumpai dalam teologi tradisional menuju relasi “gereja *bersama* dunia” dalam memperjuangkan kesejahteraan semesta.

PERILAKU WARGA JEMAAT DI RUANG PUBLIK

Kekhasan relasi “gereja *bersama* dunia” tidak terletak pada upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama. Hal ini dapat dilakukan dalam relasi “gereja *bagi* dunia”. Kekhasan relasi “gereja *bersama* dunia” terletak pada

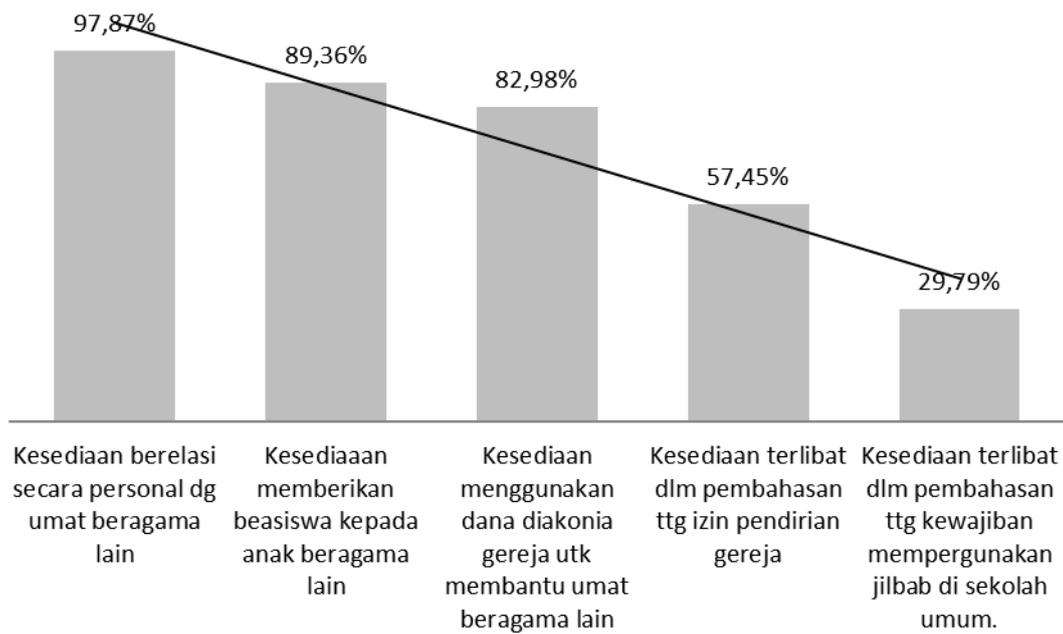
kesetaraan antarpertukaran dalam menjalin interaksi di ruang publik. Praksis bersama yang berorientasi pada tujuan atau visi bersama memiliki peran besar untuk meredakan konflik antarwawasan dunia agama-agama. Menggunakan kalimat lain dapat dituliskan bahwa melalui tindakan komunikatif perdamaian antaragama diperjuangkan. Meski demikian terdapat sebuah prasyarat niscaya, yakni partisipasi aktif warga jemaat untuk terlibat dalam interaksi komunikatif di ruang publik. Hal ini memunculkan pertanyaan, “Seperti apakah bentuk partisipasi warga jemaat di ruang publik?”

Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan mengacu pada survei yang dilakukan di sebuah jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI). Jemaat tersebut berlokasi di kota metropolitan dan memiliki jumlah anggota hampir 2.000 orang. Pemilihan jemaat kota besar didasarkan pada pengandaian bahwa masyarakat *atomic*—atau *monade* dalam peristilahan Habermas—merupakan konteks sosial jemaat tersebut. Sedangkan pemilihan dari segi jumlah anggota jemaat dimaksudkan untuk menegaskan pengandaian tersebut.²

Penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui metode pengisian kuesioner yang mengikut lima poin skala Likert. Responden yang terlibat dalam pengisian kuesioner tersebut adalah para penatua, aktifis, dan pengurus komisi dan badan pelayanan. Jumlah responden sebanyak sebesar 4,96% dari rata-rata jumlah kehadiran umat dalam kebaktian umum yang menurut catatan Buku Kehidupan Jemaat (BKJ) 2018 berjumlah 947 orang. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini. Pertama adalah perilaku umat dalam berelasi dengan umat beragama lain. Sedangkan variabel kedua adalah

persepsi umat terhadap keutamaan identitas kristiani dalam berpartisipasi di ruang publik. Pemaparan berikut hanya akan menunjukkan kecenderungan perilaku tanpa melakukan analisa statistik lebih jauh.

Hasil survei menunjukkan bahwa 97,8% responden tidak bermasalah untuk memberikan selamat pada perayaan hari raya keagamaan iman yang berbeda. Akan tetapi dalam kaitannya dengan realitas sosial yang lebih luas terlihat adanya penurunan persentase yang cukup signifikan. Sebesar 6,38% responden tidak bersedia memberikan beasiswa pribadi kepada siswa yang beragama lain. Lebih lanjut, 8,51% responden tidak bersedia jika dana diakonia gereja dipergunakan untuk menunjang umat dari agama yang berbeda. Ketika pertanyaan diperluas pada kebijakan publik, penurunan terlihat lebih besar. Sebanyak 38,3% responden tidak merasa memiliki kepentingan untuk membahas masalah kesulitan pengurusan izin pendirian gereja (IMB). Bahkan ketika permasalahan semakin diperluas pada kebijakan publik yang tidak terkait langsung dengan realitas hidup sebagian besar responden, 59,57% responden merasa tidak perlu untuk terlibat dalam pembahasan masalah tersebut. Terlihat penurunan angka berbanding lurus dengan korelasi antara isu dengan pribadi subjektif yang bersangkutan. Menggunakan kalimat lain, semakin jauh sebuah isu berkaitan secara langsung dengan realitas hidup responden, maka semakin rendah tingkat partisipasi warga jemaat. Penurunan tersebut dapat dilihat pada tren dalam Gambar 1 di bawah di mana sumbu tegak menggambarkan tingkat partisipasi sedangkan sumbu mendatar mewakili keluasan isu kepublikan.



Gambar 1. Tingkat Partisipasi dalam Menjalinkan Relasi Antarpertukaran

Rendahnya kesediaan warga jemaat untuk terlibat dalam isu-isu kepublikan yang tidak terkait secara langsung dengan realitas hidup responden berbanding terbalik dengan preferensi responden pada eksklusivitas identitas: 91,49% responden merasa bahwa negara perlu untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada umat Kristiani untuk *mewakili suara Kristen* dan 89,3% responden mendukung wakil Kristen sebagai pejabat publik guna *mewakili aspirasi umat* di ruang publik, meski 80,8% responden tidak menganggap agama lain merupakan sebuah ancaman dan 68,09% responden tidak merasa kekristenan sebagai kelompok yang paling tertindas, serta 48,94% responden tidak merasa mengalami diskriminasi karena perbedaan agama. Angka-angka di atas menunjukkan bahwa sekalipun responden tidak merasa terancam oleh kelompok lain ataupun terdiskriminasi, baik secara personal maupun komunal, namun responden memiliki kecenderungan untuk memperjuangkan aspi-

rasi kelompok melalui keterwakilan suara formal yang dilakukan oleh wakil dengan basis identitas keagamaan yang sama.

Data di atas menunjukkan mayoritas responden belum memasuki partisipasi (interaksi) komunikatif dalam menjalin relasi antarpertukaran di ruang publik. Menggunakan kalimat lain, meski sebagian besar responden telah berinteraksi dengan *liyan* namun interaksi tersebut dilakukan dengan mengikuti pola subjek-objek, baik dalam bentuk instrumental-hierarkis atau strategis-monologis.³ Tingginya persepsi responden terhadap keutamaan identitas agamawi yang berbanding terbalik dengan (rendahnya) tingkat kesediaan untuk berpartisipasi dalam pembahasan isu-isu ruang publik merupakan indikator yang menegaskan dugaan ini. Namun perlu dicatat bahwa kecenderungan tersebut tidak memungkiri terdapatnya pola interaksi komunikatif dalam jemaat tersebut. Data sekunder dalam Buku Kehidupan Jemaat (BKJ) menunjukkan berbagai program *ad hoc*

lintas iman yang telah dilaksanakan di jemaat tersebut. Hal ini diafirmasi oleh data primer meski dengan tingkat partisipasi yang rendah.

TINJAUAN KURIKULUM DAN RANCANGAN KHOTBAH

Dalam konteks hidup bergereja, kondisi jemaat di atas tidak dapat dilepaskan dari desain kurikulum dan implementasi desain dalam rancangan khotbah. Dengan meminjam pendapat David Kirkpatrick (1994, 19–26) dapat ditegaskan keberadaan hubungan antara partisipasi umat di ruang publik (*behavior*) dengan tujuan kurikulum sebagai *final objective* yang hendak dicapai melalui program pembinaan anggota jemaat. Oleh sebab itu pertanyaan di atas dapat dirumuskan kembali sebagai berikut: “Apakah kurikulum pembinaan dan rancangan khotbah leksionari telah mengadopsi gagasan interaksi komunikatif?”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis akan menggunakan dua kriteria sebagai lensa untuk mencermati desain kurikulum dan rancangan khotbah leksionari. Dua kriteria yang disarikan dari pendapat Habermas tersebut adalah: kriteria universalitas yang mengangkat problema kesejahteraan/keprihatian/penderitaan bersama lintas etnoreligiusitas dan kriteria interaksi antartpartikularitas (instrumental, strategis, komunikatif).

Dalam rancangan kurikulum pembinaan anggota jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) telah nampak berbagai isu ruang publik yang diangkat sebagai konteks hidup bergereja. Isu-isu tersebut mencakup kemiskinan, gaya hidup konsumtif, kekerasan, korupsi, ketidakadilan, pornografi dan seks di luar pernikahan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, serta relasi keluarga, juga isu kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi.⁴ Bertolak dari isu-isu ruang publik tersebut kurikulum pembinaan anggota jemaat merumuskan tujuannya: *pertama*, agar anggota jemaat memiliki iman yang teguh. *Kedua*, agar anggota jemaat mewujudkan iman di tengah kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan di tengah masyarakat. Penekanan poin ini terletak pada karakter dialogis yang terbentuk antara iman dengan pengalaman hidup. *Ketiga*, agar anggota jemaat mewujudkan panggilan pelayanan dalam kehidupan bergereja. Penekanan bagian ini terletak pada kekhasan eklesiologi GKI. *Keempat*, agar anggota jemaat mewujudkan kesejahteraan bagi sesama tanpa membedakan agama, suku, dan ras. *Kelima*, agar anggota jemaat mewujudkan kepedulian ekologis. *Keenam*, agar anggota jemaat mewujudkan panggilan dan karya bagi bangsa dan negara. *Ketujuh*, bersikap kritis terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dua dari tujuh butir di atas dengan lugas menunjukkan bahwa kurikulum telah diarahkan pada upaya untuk mewujudkan iman dalam praksis kehidupan (butir ke-2) dan untuk memperjuangkan kesejahteraan lintas etnoreligiusitas (butir ke-4). Nampak karakter dialogis antara iman dan pengalaman hidup serta peran publik warga jemaat telah menjadi perhatian dalam rancangan tersebut. Hal ini berarti bahwa desain kurikulum telah memperhatikan kriteria universalitas di atas. Walaupun demikian kemajemukan belum secara tersurat diangkat sebagai konteks hidup umat. Oleh sebab itu tidak nampak karakter dialektis yang mewarnai interaksi antartpartikularitas. Singkatnya interaksi komunikatif belum termaktub di dalam desain kurikulum yang dimaksud.

Setelah menilik desain kurikulum, pembahasan akan diteruskan dengan meninjau

rancangan khotbah leksionari dalam *Dian Penuntun*. Peninjauan akan dilakukan dengan mempergunakan dua kriteria di atas sebagai lensa selisik untuk mencermati tujuan dari tema-tema khotbah yang muncul dalam *Dian Penuntun*. Setiap tema yang memenuhi kriteria universalitas akan dikategorikan sebagai tema kepublikan. Selanjutnya kriteria kedua akan dipergunakan untuk meninjau tema-tema kepublikan tersebut.

Tinjauan akan dibatasi pada dilakukan pada Edisi 19 (November 2014–Mei 2015) dan Edisi 25 (Desember 2017–Mei 2018). Pemilihan didasarkan pada kesamaan tahun liturgi antara kedua edisi, sehingga dimungkinkan untuk melakukan perbandingan antara keduanya mengingat kedua edisi merujuk pada teks leksionari yang sama.⁵ Selain itu Edisi 25 merupakan edisi yang dipergunakan pada saat penelitian empiris di atas dilakukan.

Secara umum dijumpai keserupaan pokok bahasan dalam kedua edisi. Edisi 19 menunjukkan terdapatnya 8 (dari 31) tema yang memenuhi kriteria pertama (selanjutnya akan disebut dengan istilah tema-tema “kepublikan”).⁶ Tiga tema pertama muncul secara berturut-turut pada Adven IV, Malam Natal, dan Natal, sehingga membentuk sebuah kelompok tema kepublikan (Tabel 1). Terlihat kesinambungan antara ketiganya yang sama-sama memberikan penekanan kepada umat agar bersedia memikul risiko demi terwujudnya keselamatan Allah di atas muka bumi. Makna “keselamatan” sendiri dikaitkan dengan perwujudan *syalom*, keadilan dan kebenaran di tengah kekuasaan yang menindas dan membawa penderitaan. Demikian pula dengan kelahiran Kristus dihayati sebagai transformasi tatanan penciptaan dalam perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di atas muka bumi.

Tabel 1. Kelompok Tema Kepublikan Pertama pada Edisi 19 dan Pembedingnya

KALENDER LITURGIS	TEMA (Tujuan)	
	Tema Kepublikan (Edisi 19)	Tema Pembeding (Edisi 25)
Minggu Adven IV	“Taat dan Setia Seperti Maria” (Umat meneladani Maria yang taat dan setia kepada kehendak Allah, berani menempuh risiko, asal karya keselamatan Allah dapat terwujud dalam hidup umat manusia).	“Janji yang Manis” (Umat menghayati Allah setia memenuhi janji-Nya, dan mengenal cara-cara kreatif-Nya menyelamatkan manusia)
Malam Natal	“Raja Damai Telah Datang” (Umat menyambut kelahiran Kristus dengan mewujudkan dan memperjuangkan <i>syalom</i> , keadilan, dan kebenaran, di tengah kekuasaan masa kini yang menindas dan membawa penderitaan).	“Sukacita untuk Seluruh Bangsa” (Umat menghayati sukacita Natal sebagai pengalaman menerima kasih karunia Allah dan bersedia menjalani kehidupan dengan gaya hidup yg Allah sukai).
Natal	“Raja yang Datang Melakukan Transformasi Hidup” (Umat menghayati kehadiran Sang Raja dengan pemerintahan-Nya membawa transformasi hidup bagi seluruh ciptaan dalam perjuangan mewujudkan keadilan dan kebenaran di muka bumi).	“Tuhan Yang Mulia dalam Keugaharian” (Umat memahami Natal adalah peristiwa Tuhan menjadi daging sehingga menyatu dengan ciptaan-Nya dan terinspirasi untuk menghadirkan kemuliaan-Nya dalam tindakan sederhana tetapi bermakna bagi Tuhan dan sesama).

Setelah tiga tema bersinambung terbatas di atas, Edisi 19 kembali memunculkan tiga tema kepublikan secara berturut-turut pada Minggu V sesudah Epifani, Minggu Transfigurasi, dan Rabu Abu. Ketiga tema tersebut kembali membentuk kelompok tema kepublikan sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah. Tema-tema tersebut memiliki tujuan agar umat termotivasi untuk berbagi kasih, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan

mewujudkan kesalehan secara sosial. Kembali terlihat kesinambungan antara tujuan khotbah di ketiga minggu tersebut. Di lain pihak, pada Edisi 25 hanya di Minggu V Epifani umat diajak untuk berbagi kabar baik di mana kabar baik itu sendiri dimaknai sebagai kehadiran Yesus (2017, 117). Akan tetapi dimensi sosio-politik sebagai perluasan “kabar baik” belum disentuh dalam uraian rancangan khotbah sehingga tidak memenuhi kriteria pertama.

Tabel 2. Kelompok Tema Kepublikan Kedua pada Edisi 19 dan Pembandingnya

KALENDER LITURGIS	TEMA (Tujuan)	
	Tema Kepublikan (Edisi 19)	Tema Pembanding (Edisi 25)
Minggu V Sesudah Epifani	“Lebih dari Mujizat” (Umat memahami mujizat sebagai pernyataan kemuliaan Allah di tengah manusia dan termotivasi untuk membagikan kasih kepada orang sekitar).	“Tuhan Hadir di Tengah Hidup yang Getir” (Umat memiliki pemahaman tentang diri Allah dan bersedia membawa kabar baik pada sesama).
Transfigurasi	“Dimuliakan dalam Kemuliaan Kristus” (Umat memahami transfigurasi sehingga dapat menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam keseharian hidup).	“Kemuliaan Allah pada Wajah Kristus” (Umat memahami kemuliaan Allah dan merespon melalui kesaksian akan karya Allah dlm hidupnya)
Rabu Abu	“Kesalehan yang Dikehendaki Tuhan” (Umat mewujudkan kesalehan tidak sekadar ritual tetapi berbagi kehidupan bersama sesama).	“Aku Debu, Debu Itu Aku!” (Umat menyadari kefanaan diri dan mengendalikan diri sebagai wujud pertobatan (gaya hidup sederhana)).

Masih terdapat dua tema kepublikan lain yang muncul di Edisi 19 namun tidak secara berturutan. Prapaska V mengajak umat untuk rela berkorban demi kepentingan dan kesejahteraan sesama. Sedangkan tema kepublikan terakhir muncul pada peringatan Kenaikan Yesus yang memiliki tujuan agar umat mengangkat harkat dan martabat manusia.

Berbeda dengan kelompok tema yang muncul di Edisi 19. Di Edisi 25 tema-tema kepublikan muncul secara tersebar. Dari 31 minggu yang dibandingkan hanya terdapat

enam tema yang mengangkat tema kepublikan. Dari keenam tema tersebut hanya terdapat tiga tema yang menitik pada tanggung jawab publik umat: *tema pertama* nampak pada Prapaska III yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan menghindarkan penindasan, serta mengubah gaya hidup personal. *Tema kedua* terlihat pada Minggu Palmarum yang memberikan penekanan pada partisipasi umat dalam menata dunia melalui kebenaran hukum dan keadilan bagi semua orang. *Tema ketiga* terlihat pada Jumat Agung yang

mengulas pembebasan sesama yang menderita. Sedangkan tiga tema lainnya menyinggung

permasalahan dan tanggung jawab sosial secara umum. Berikut tabel perbandingannya:

Tabel 3. Persebaran Tema Kepublikan di Edisi 25 dan Pembandingnya

KALENDER LITURGIS	TEMA (Tujuan)	
	Tema Kepublikan (Edisi 25)	Tema Pembanding (Edisi 19)
Minggu Adven III	<p>“Pewarta yang Memulihkan”</p> <p>(Umat dimampukan untuk hidup sebagai pewarta Kristus yang membawa pemulihan bagi anggota keluarga dan orang sekitar).</p>	<p>“Pemberita yang Rendah Hati”</p> <p>(Umat meneladani Yohanes Pembaptis yang memuliakan Yesus dan bukan dirinya).</p>
Prapaska III	<p>“Yesus Bait Allah Yang Sejati”</p> <p>(Umat belajar untuk percaya kepada Yesus dan memperjuangkan keadilan, menghindari penindasan, serta belajar tidak dikuasai kultur uang).</p>	<p>“Menguduskan diri dengan Menaati Firman Tuhan”</p> <p>(Umat memahami tujuan Firman Tuhan adalah membebaskan dari perbudakan dosa, sehingga umat terpanggil untuk menaati firman).</p>
Minggu Palmarum	<p>“Pengadilan: Keadilan atau Kepentingan”</p> <p>(Umat ikut menata dunia menjadi lebih baik dengan menyatakan kebenaran hukum, dan keadilan bagi semua orang).</p>	<p>“Mengosongkan Diri, Taat memikul Salib”</p> <p>(Umat memahami tindakan Yesus sebagai pengosongan diri dan memotivasi agar juga mengosongkan diri dalam kehidupan sehari-hari).</p>
Jumat Agung	<p>“Merengkuh Kematian demi Keselamatan”</p> <p>(Umat memahami penderitaan Yesus demi keselamatan manusia dan bersedia membebaskan sesama yang menderita).</p>	<p>“Diperdamaikan Melalui Kematian Kristus”</p> <p>(Umat menghayati karya perdamaian Kristus sebagai umat juga dimampukan untuk hidup dalam damai dengan Allah dan sesama).</p>
Paska II	<p>“Komunitas yang Dipulihkan dan Diutus”</p> <p>(Umat memahami kemunculan Yesus mengubah komunitas murid, memampukan peningkatan kualitas persekutuan, dan melakukan tindakan nyata bagi masyarakat sekitar).</p>	<p>“Kuasa Kebangkitan Yesus Memampukan Umat untuk Berbagi”</p> <p>(Umat belajar dari teladan jemaat mula-mula; penekanan pada hidup berkomunitas).</p>
Pentakosta	<p>“Pentakosta, Roh Kudus menyapa Bangsa-Bangsa”</p> <p>(Umat memahami konteks Pentakosta, memahami karya Roh Kudus dalam pelbagai suku dan menghargai kepelbagaian budaya).</p>	<p>“Karya Roh Kudus bagi Dunia”</p> <p>(Umat mengalami karya Roh Kudus dan berperan aktif memperjuangkan persekutuan yang patut diteladani dunia).</p>

Hal menarik yang muncul dari perbandingan di atas adalah tidak adanya tema kepublikan yang muncul di dua

kalender liturgis yang sama. Peta tersebut menunjukkan bahwa teks leksionari yang sama dapat diinterpretasi dengan menggunakan

kacamata yang berbeda dan memunculkan tujuan yang berbeda pula. Secara singkat preferensi teologis penyusun rancangan akan mewujudkan dalam tujuan khotbah. Untuk meminimalkan pengaruh preferensi tersebut, sekaligus mengangkat isu kepublikan sebagai tanggung jawab gereja yang menghisab umat di dalamnya, maka di bagian keempat akan diusulkan sebuah paradigma integratif yang merelasikan setiap teks bacaan dengan dimensi personal, interpersonal, sosial, dan semesta ekologis. Paradigma tersebut juga diharapkan dapat mengisi minimnya tema-tema kepublikan di sepanjang kalender gerejawi terlebih dengan memperhatikan berkurangnya porsi pembahasan mengenai isu kepublikan.

Setelah melakukan kategorisasi dan perbandingan, keempat belas tema di atas selanjutnya akan ditinjau dengan menggunakan kriteria kedua. Akan tetapi dari delapan tema di Edisi 19 dan enam tema di Edisi 25 belum terlihat khotbah yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan kriteria universalitas bersama dengan partikularitas lainnya. Hal tersebut menunjukkan belum terdapatnya upaya yang cukup untuk mengembangkan interaksi komunikatif antarumat beragama yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan atau keprihatinan bersama. Alih-alih melakukan perjuangan bersama bagi kemaslahatan semesta (*gereja bersama dunia*), interaksi antarpertikularitas dalam rancangan khotbah yang ditinjau di atas mengikuti pola umat yang memperjuangkan kemaslahatan bagi sesama dan semesta (*gereja bagi dunia*).

MENUJU PARADIGMA INTEGRALISTIK BERBASIS PERJUMPAAN

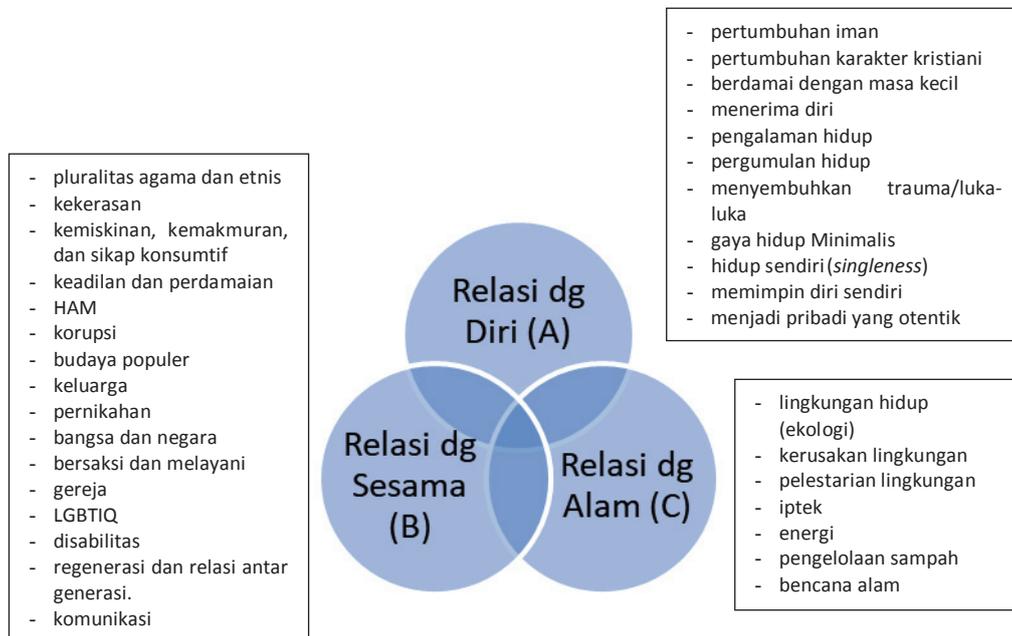
Pemaparan di atas menunjukkan bahwa tema-tema kepublikan muncul secara sangat terbatas dalam rancangan khotbah leksionari. Diduga minimnya tema-tema kepublikan dalam rancangan khotbah tersebut berbanding lurus dengan rendahnya tingkat partisipasi responden untuk bahu-membahu bersama partikularitas lain dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dugaan ini diperkuat dengan absennya pola interaksi komunikatif, baik dalam desain kurikulum maupun dalam rancangan khotbah leksionari. Tulisan ini akan menenguhkan sebuah penarikan kesimpulan. Perhatian akan dipusatkan pada model paradigmatik yang tersedia untuk mengintegrasikan tema-tema kepublikan ke dalam penyusunan kurikulum pembinaan anggota jemaat dan implementasinya dalam rancangan khotbah leksionari.

1. Paradigma Integralistik Sebagai Implementasi Gagasan Habermas

Dalam kurikulum pendidikan, tema-tema kepublikan banyak disinggung dalam bidang studi perdamaian. European Intercultural Forum (2014) merumuskan perdamaian sejati sebagai irisan antara damai dengan diri sendiri, dengan lingkungan sosial, dan dengan alam semesta (*inner peace, social peace, environmental peace*). Model ini sejajar dengan desain kurikulum GKI yang memuat hubungan-hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama, alam semesta, dan dengan diri sendiri. Relasi hubungan-hubungan tersebut kemudian dituangkan dalam sejumlah tema

bahasan, misalnya: Allah Trinitas, pertumbuhan karakter kristiani, budaya populer, kerusakan

ekologis, dan seterusnya. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Adopsi Model Irisan dalam Kurikulum Pembinaan Warga Jemaat

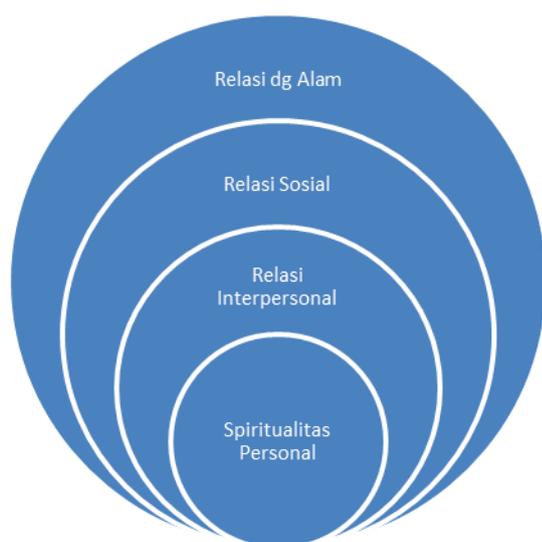
Gambar di atas menunjukkan adopsi model irisan yang digunakan dalam kurikulum pembinaan warga jemaat. Relasi dengan Allah diandaikan sebagai semesta. Sedangkan hubungan-hubungan lainnya termaktub di dalam semesta relasi dengan Allah. Yang dimaksudkan adalah bahwa relasi dengan diri, dengan sesama, dan dengan alam tidak terlepas dari relasi dengan Allah. Hal ini berarti bahwa setiap tema pembahasan terkait dengan Allah. Tentu pola ini telah mengarah pada sasaran yang tepat. Meski demikian model irisan ini memiliki sebuah permasalahan. Problem tersebut nampak dari keberadaan wilayah-wilayah yang berada di luar hubungan-hubungan lainnya. Misalnya keberadaan wilayah relasi dengan diri yang berada di luar relasi dengan sesama dan dengan alam ($A \cap B^c \cap C^c$). Kesalahan personal yang dilepaskan dari relasi sosial maupun

dari kesadaran ekologis merupakan contoh permasalahan yang muncul karena keberadaan wilayah problematik tadi. Contoh lain nampak dari keberadaan wilayah irisan antara relasi dengan diri dan dengan sesama namun berada di luar relasi dengan alam ($A \cap B \cap C^c$). Kekristenan yang abai terhadap kelestarian ekologis merupakan contoh permasalahan lain yang muncul karena terdapatnya wilayah di luar irisan dengan alam.

Keseimbangan merupakan keniscayaan dalam model di atas. Irisan antara ketiga hubungan merupakan ideal dalam model tersebut ($A \cap B \cap C$). Akan tetapi pendalaman terhadap rancangan khotbah di atas menunjukkan sulitnya keseimbangan tersebut dicapai. Permasalahan ini dapat dipahami mengingat bacaan leksionari tidak selalu mengacu pada tanggung jawab publik gereja. Namun untuk meningkatkan

partisipasi publik umat permasalahan ini perlu diselesaikan. Peninjauan ulang terhadap keseimbangan hubungan-hubungan merupakan salah satu jalan. Pilihan lain adalah dengan menggantikan model di atas dengan model yang lain mengingat problema model irisan tidak hanya terletak pada keseimbangan antarhubungan tetapi juga pada keberadaan wilayah-wilayah eksklusif yang saling terlepas satu dengan yang lain.

Salah satu model alternatif yang tersedia ditawarkan oleh Navarro-Castro dan Nario-Gallace (2008, 16). Mereka menempatkan hubungan-hubungan yang ada di dalam tingkatan atau perluasan. Gambar 3 berikut merupakan pengembangan dari model tersebut. Sama seperti model irisan, model ini juga mengandaikan Allah sebagai semesta relasi. Namun apabila model pertama mengandaikan terdapatnya wilayah di luar irisan, maka model ini memasukkan keseluruhan dimensi personal ke dalam konteks global, baik sosial maupun ekologis.



Gambar 3. Adopsi Model Integratif dalam Kurikulum Pembinaan Warga Jemaat

Dalam penerapannya, penguraian sebuah tema, sebutlah hubungan diri Allah, tidak dapat dilepaskan dari hubungan-hubungan lainnya. Yang dimaksudkan adalah bahwa tafsir atas teks leksionari perlu dikaitkan dengan diri Allah, diri sendiri, relasi sosial, dan juga dengan lingkungan ekologis. Perihal urutan pengaitan tidak bersifat baku. Setiap relasi dapat menjadi awal penguraian bergantung tekanan teks leksionari pada Minggu tersebut. Gagasan ini dituangkan dalam bentuk lingkaran-lingkaran yang tersusun secara eksentrik dalam Gambar 3 di atas. Yang menjadi inti model ini adalah relasi yang satu tidak terlepas dari yang lain. Misalnya hubungan antara Allah Trinitas dengan pertumbuhan karakter kristiani, pengaruhnya terhadap budaya populer serta dampaknya pada tingkat kerusakan ekologis. Hubungan rangkap 4 lainnya (relasi dengan Tuhan, sesama, alam, dan diri) dapat dirumuskan ulang secara kreatif menurut bacaan leksionari dan alur logis hubungan-hubungan.

Model integralistik di atas sejajar dan sekaligus merupakan penerapan gagasan Habermas yang membedakan agama dalam kategori “yang etis” (privat) dan “yang moral” (publik). Keduanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Lebih jauh realitas privat termaktub di dalam ruang publik, namun rasionalitas partikular tidak menentukan nalar publik. Sebagaimana telah diuraikan, nalar ruang publik atau “yang moral” dibentuk dari interaksi gagasan masing-masing partikularitas mengenai sebuah titik kontak kepublikan tertentu. Ranah privat atau “yang etis” tetap terpelihara di luar relasi *ad hoc* antaragama. Penerapan gagasan ini sebagai sebuah paradigma alternatif adalah dengan menempatkan spiritualitas personal

sebagai bagian dari konteks sosial-global. Yang pertama dipengaruhi oleh yang kedua. Demikian pula sebaliknya. Problema sosial dan global memberikan umpan balik kepada spiritualitas personal dan merupakan tanggung jawab bersama agama-agama. Nampak gerakan sentripetal berjumpa dengan gerakan sentrifugal secara dialektis. Lebih lanjut tanggung jawab dan aktualisasi spiritualitas tersebut merupakan tanggung jawab bersama setiap partikularitas yang berkoeksistensi di ruang publik yang sama.

2. Implementasi Model: Desain Perjumpaan Berkesinambungan

Selain mengintegrasikan seluruh dimensi kehidupan, model integralistik juga menuntut karakter holistik dalam implementasinya. Yang dimaksudkan adalah bahwa paradigma tersebut tidak sekadar dipergunakan untuk menambahkan informasi dan pengetahuan (*knowledge-head*), tetapi menuntut perubahan sikap (*attitude-heart*) melalui pembekalan keterampilan aplikatif (*skills-hand*). Kirkpatrick dalam tulisannya yang telah disinggung di atas menyatakan terdapatnya kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan agar terjadi perubahan. Kondisi-kondisi tersebut adalah keinginan untuk berubah (*desire to change*), pemahaman tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya (*what and how to do*), serta lingkungan yang mendukung terjadinya perubahan (*right climate*), dan juga *reward* yang diperoleh (1994, 19–26). Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa motivasi umat untuk menginternalisasi pengajaran serta mengeksternalisasikannya dalam bentuk tindakan perlu ditingkatkan dan iklim kondusif

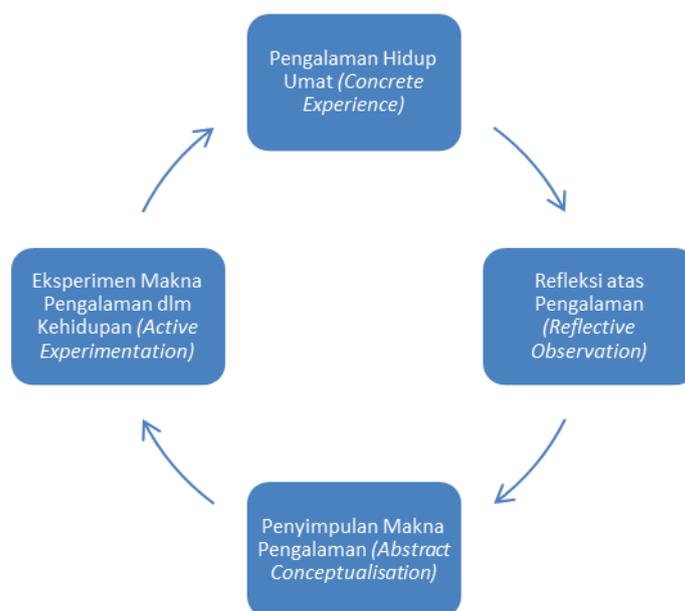
yang memwadahi afeksi dan aksi umat di ruang publik harus diciptakan.

Salah satu metode yang dapat dipergunakan adalah dengan memperhadapkan umat dengan realitas sosial melalui desain perjumpaan komunikatif-partisipatif. Pendekatan partisipatori yang mengangkat pengalaman perjumpaan merupakan metode niscaya dalam pendidikan kaum dewasa. Adapun sasaran akhir yang dituju adalah partisipasi umat dalam interaksi komunikatif. Dapat ditandaskan bahwa partisipasi aktif merupakan titik awal sekaligus muara pembinaan dengan penekanan pada interaksi komunikatif antartikularitas keagamaan guna mewujudkan kemaslahatan bersama (bdk. European Intercultural Forum 2014, 20–22).

Konsep di atas serupa dengan John Dewey yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan rekonstruksi dan reorganisasi pengalaman naradidik yang memberikan makna (baru) pada pengalaman (lama) (Harris dan Morrison 2013, 103). Dewey sendiri mempertanyakan metode pendidikan tradisional yang bersifat satu arah dan dogmatis-otoriter. Ia mengembangkan model pendidikan progresif yang memasukkan dimensi pengalaman ke dalam proses pendidikan sekaligus bersikap kritis terhadap pengalaman sebagai dasar normatif proses pendidikan (Dewey 2002, 21–43). Apabila pendapat Dewey dikaitkan dengan pola mimbar gerejawi, maka terdapat sejumlah pertanyaan yang dapat dimunculkan mengingat secara tradisional khotbah mengikuti pola *top-bottom* seperti yang dikritiknya. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengubah pola khotbah karena Dewey sendiri mengungkapkannya prinsip interaksi antara

realitas objektif—dapat dipahami sebagai penguraian Alkitab—dengan pengalaman kontekstual (Dewey 2002, 32–6). Penekanan terletak pada konteks hidup umat, termasuk berbagai realita sosial-ekologis di dalamnya, yang perlu diangkat ke permukaan kesadaran

untuk selanjutnya berdialog dengan teks bacaan pada Minggu tersebut. Secara praktis prinsip interaksi Dewey tertuang dalam model siklus belajar berbasis pengalaman yang dirumuskan oleh David Kolb (Miettinen 2000, 64–5; McLeod 2017):



Gambar 4. Siklus Belajar Kolb

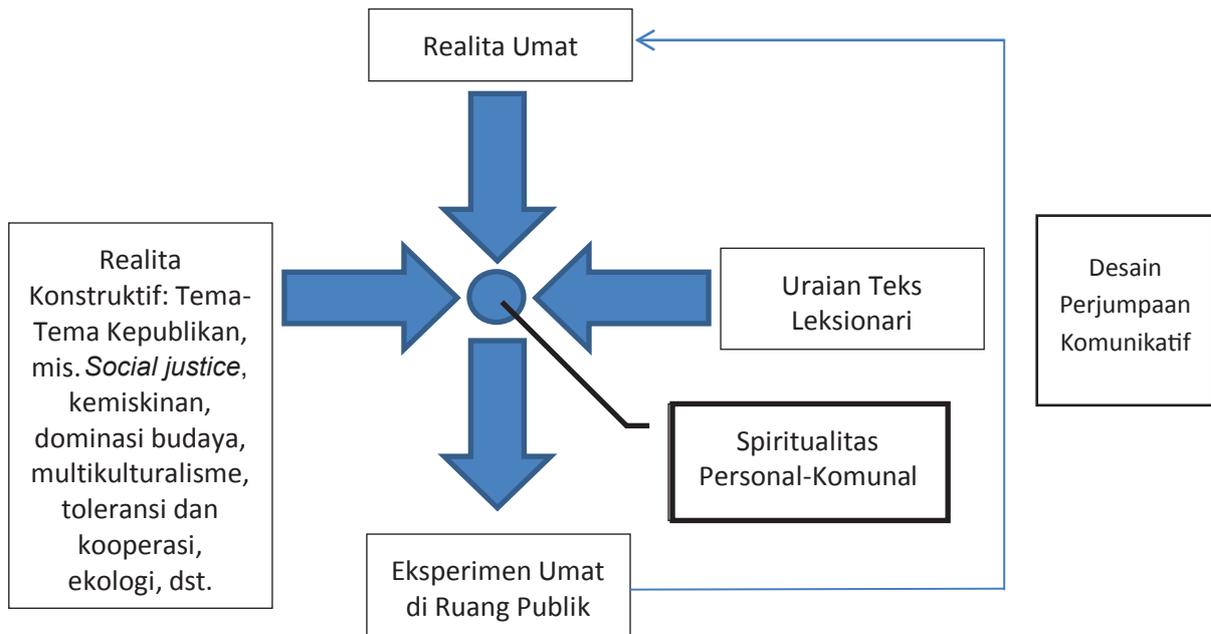
Gambar di atas menunjukkan bahwa umat tidak hadir dalam kehampaan konsep pemikiran. Terdapat pengalaman nyata yang telah umat alami dan refleksikan. Yang menjadi catatan adalah bahwa proses refleksi, yakni internalisasi nilai, mula-mula dilakukan menurut pra-paham subjek. Oleh karena itu implementasi paradigma integralistik perlu memperhatikan baik *concrete experience* maupun *reflective observation*. Sebagaimana disinggung di atas, konteks hidup merupakan titik sentral yang harus disorot oleh teks.

Tahap berikut dalam siklus Kolb adalah konseptualisasi abstrak, yakni penyimpulan makna pengalaman, yang dapat terjadi secara natural dari proses dialektis kehidupan, maupun melalui intervensi mimbar

dengan cara memperhadapkan umat secara eksperimental-simulatif dengan realitas sosial tertentu. Menggunakan kalimat lain, mimbar perlu memberikan narasi alternatif yang memungkinkan pengalaman umat dimaknai secara berbeda. Selanjutnya realitas konstruktif tersebut ditelaah secara teologis berdasarkan teks leksionari yang melandasi penguraian. Sebagaimana disinggung, abstraksi teologis tidak berhenti pada dirinya sendiri sebagai pengetahuan kognitif namun menuntut kesadaran dan tanggung jawab umat untuk mengambil peran dalam ruang publik sesuai dengan realitas konstruktif yang diperhadapkan kepada umat. Pada titik konseptualisasi abstrak, umat didorong untuk memaknai kembali pengalaman hidup dan nilai-nilai yang

dipegang dengan menggunakan kacamata baru, yakni melalui teks yang dikhotbahkan. Pada akhirnya siklus ditutup, sekaligus diulang kembali secara eksperimental melalui mandat untuk mengambil bagian dalam diskursus di ruang publik. Hal ini berarti bahwa tanpa

adanya perjumpaan dengan realita sosial maka proses pembelajaran akan terhenti. Tetapi tanpa adanya desain perjumpaan yang berulang, diskursus teks-konteks secara rekursif, maka proses juga tidak berjalan. Secara skematik proses tersebut digambarkan sebagai berikut:⁷



Gambar 5. Skema Implementasi Paradigma Integralistik

Sebagai penutup pembeda utama gagasan di atas dengan praktik tradisional terletak pada objek refleksi. Secara tradisional, penguraian Alkitab direfleksikan umat untuk diwujudkan nyata di dalam praksis kehidupan. Yang menjadi titik awal adalah Alkitab yang diuraikan secara deduktif (*top-down*). Pendekatan ini berbeda dengan implementasi gagasan Kolb. Titik awal rancangan khotbah leksionari adalah realita sosial sebagai konteks hidup umat. Pendekatan induktif (*bottom-up*) merupakan titik tolak penyusunan rancangan khotbah leksionari bersama dengan pendekatan tradisional agar terbentuk karakter dialogis di mana Alkitab berperan sebagai dasar normatif yang memberikan perspektif alternatif terhadap

realita yang umat hadapi.⁸ Pada akhirnya umat perlu diperhadapkan dengan berbagai realita sosial-ekologis melalui tema-tema kepublikan yang dirancang secara periodik agar membentuk kontinuitas pengalaman dan berulang secara rekursif. Tambahan akhir yang akan diberikan adalah bahwa realita sosial yang umat hadapi merupakan realita bersama agama-agama yang menuntut penyelesaian melalui upaya bersama pula.

KESIMPULAN

Menjaga ketegangan antara iman sebagai realita personal yang berhadapan dengan iman

sebagai realita sosial bukan perkara mudah. Permasalahan menjadi semakin sulit karena interaksi di ruang publik menuntut kesetaraan antartpartikularitas. Diskursus-mutual merupakan keniscayaan dalam masyarakat majemuk. Ironisnya, politik identitas dan eksklusivitas justru mewarnai interaksi di ruang publik. Oleh sebab itu, kurikulum pembinaan anggota jemaat perlu menjaga keseimbangan antara keduanya: membangun kesalehan personal sekaligus tanggung jawab sosial, merawat keunikan identitas komunal sekaligus mengembangkan identitas bersama. Model yang diusulkan di atas berupaya membangun jembatan komunikasi antara privat-publik melalui paradigma integralistik: spiritualitas personal sepenuhnya termaktub dalam dimensi publik-global.

Sebagai model alternatif yang masih prematur paradigma ini perlu dikembangkan lebih lanjut. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah: *pertama*, mengkaji kemungkinan untuk mengintegrasikan seluruh dimensi hubungan-hubungan sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan saling berkorespondensi satu dengan yang lain sebagaimana diawali dalam model integralistik di atas. *Kedua*, dengan memusatkan perhatian pada karya bersama lintas agama. “Gereja bersama dunia” merupakan implementasi teologis dari model Habermas. Dalam konteks pembinaan jemaat pola tersebut diusulkan sebagai paradigma misional yang melatari penyusunan kurikulum dan rancangan khotbah. *Ketiga*, merumuskan tema-tema besar (kepublikan) yang diuraikan melalui berbagai subtema bulanan dan mingguan. Diupayakan agar tema-tema periodik yang diangkat dapat disesuaikan dengan kalender liturgis. Misalnya bulan Pentakosta dapat dipergunakan untuk

mengangkat berbagai tema karya Roh Kudus dalam hubungannya dengan kelestarian ekologis sebagaimana nampak dalam *Derap Remaja* Edisi 45 (Januari–Juni 2019).⁹ Edisi ini telah mempergunakan kalender gerejawi sebagai acuan untuk merumuskan tema-tema partisipatif bulanan dan mingguan. *Keempat*, mengangkat konteks hidup umat dalam menyusun tema-tema khotbah. Singkatnya, mimbar perlu didesain sebagai sarana untuk memberdayakan umat untuk mengujicobakan relevansi berita mimbar di ruang publik bersama umat lain dan membentuk pengalaman hidup dialektis antara realita dengan teks Kitab Suci.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartos, Otomar J., dan Paul Wehr. 2002. *Using Conflict Theory*. New York: Cambridge University Press.
- Dewey, John. 2002. *Pengalaman dan Pendidikan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- European Intercultural Forum. 2014. *Mainstreaming Peace Education: Methodologies, Approaches and Visions*. Lifelong Learning Programme.
- Gutmann, Amy (ed). 1994. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. NJ: Princeton University Press.
- Habermas, Jürgen. 1994. “Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional State.” Dalam *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, Amy Gutmann (ed.), 107–48. NJ: Princeton University Press.
- Hardiman, Budi. 2015. “Habermas dan Peran Publik Agama.” Dalam *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan Agama dan*

- Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*, 17–26. Yogyakarta: Kanisius.
- Harris, Ian M., and Mary Le Morrison. 2013. *Peace Education*. North Carolina: McFarland.
- Hefner, Robert (ed.). 2007. *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Yogyakarta: Impulse-Kanisius.
- Kim, Sung-Min, Banawiratma, dan Dicky Sofjan. 2020. “Religious Pluralism Discourse in Public Sphere of Indonesia: A Critical Application of Communicative Action Theory to Inter-Religious Dialogue.” *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 10, No. 2: 19–48.
- Kirkpatrick, Donald L. 1994. *Evaluating Training Programs: The Four Levels*. San Fransisco, CA: Berret-Koehler Publisher, Inc.
- Knitter, Paul. 1998. “Toward a Liberation Theology of Religions.” Dalam *The Myth of Christian Uniqueness: Toward a Pluralistic Theology of Religions*, John Hick (ed.), 178–200. Maryknoll, NY: Orbis.
- _____. 2012. *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Komisi Pengadaan Materi Bina BPMS GKI. t.t. *Desain Kurikulum Pembinaan Anggota Jemaat GKI*. Bahan tidak dipublikasikan.
- _____. 2017. *Dian Penuntun: Rancangan Khotbah Leksionari*. Edisi 25. Jakarta: Grafika KreasIndo.
- _____. 2014. *Dian Penuntun: Rancangan Khotbah Leksionari*. Edisi 19. Jakarta: Grafika KreasIndo.
- Macleod, Saul. 2017. “Kolb Learning Styles.” Diakses 2 Agustus 2018. <https://simplypsychology.org/learning-kolb.html>.
- Menoh, Gusti A.B. 2015a. *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 2015b. “Aplikasi Etika Diskursus Bagi Dialog Interreligius.” *Diskursus*, Vol. 14, No. 2, Oktober: 193–220.
- Miettinen, Reijo. 2000. “The Concept of Experiential Learning and John Dewey’s Theory of Reflective Thought and Action.” *International Journal of Lifelong Education*, Vol. 19, No. 1: 54–72.
- Nacarro-Castro, Loreta, and Jasmin Nario-Galace. 2008. *Peace Education: The Pathway to a Culture of Peace*. Quezon City: Center fo Peace Education, Miriam College.
- Singgih, E. Gerrit. 2016. “Suffering as Ground for Religious Tolerance: An Attempt to Broaden Pannikar’s Insight on Religious Pluralism.” *Exchange*, 45, No. 2: 111–29.
- _____. 2009. *Menguak Isolasi Menjalin Relasi: Teologi Kristen dan Tantangan Dunia Postmodern*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- _____. 2000. *Berteologi dalam Konteks: Pemikiran-Pemikiran Mengenai Kontekstualisasi Teologi di Indonesia*. Jakarta-Yogyakarta: BPK Gunung Mulia-Kanisius.

Sapsuha, M. Tahir. 2013. *Pendidikan Pasca Konflik: Pendidikan Multikultural Berbasis Konseling Budaya Masyarakat Maluku Utara*. Yogyakarta: LKiS.

Sunarko, A. 2010. "Ruang Publik dan Agama menurut Habermas." Dalam *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.

Tim Derap Remaja. 2019. *Derap Remaja: Bahan Pembinaan Remaja Gereja Kristen Indonesia*. Edisi 45. Yogyakarta: Komisi Pengadaan Materi Bina GKI.

Catatan:

¹ Knitter menyebut model dialog *ad hoc* sebagai pendekatan "Habermasian". Ia menjelaskan proses diskursif tersebut dilakukan secara spontan: "They simply plunge coldly into the dialogue, trusting that, in the very praxis of communication, common ground or shared view points will be discovered or created. Even though the common ground is not at all terra firma, even though it remains 'shaky ground' it can suffice to overcome incommensurability (e.g. between Sunyata and God) and can lead to mutual understanding" (Knitter 1998, 185).

² Alat penelitian dikembangkan secara bersama oleh peserta kuliah Pembangunan Perdamaian Lintas Agama, pada Program Studi Pascasarjana Kajian Konflik dan Perdamaian di Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, tanggal 6–12 November 2017.

³ Gagasan ini ditegaskan dalam wawancara mendalam yang penulis lakukan dengan sejumlah informan pada rentang 5 Februari–27 Maret 2018.

⁴ Uraian mengacu pada naskah "Desain Kurikulum Pembinaan Anggota Jemaat Gereja Kristen Indonesia".

⁵ Penulis berterima kasih pada Dr. Tabita Kartika Christiani yang menyarankan agar perbandingan dilakukan pada edisi-edisi yang berada pada tahun liturgi yang sama.

⁶ Edisi 19 dan 25 masing-masing memuat 32 tema yang didasarkan pada teks bacaan yang sama. Akan

tetapi karena terdapat kerusakan pada cetakan edisi 19, yakni pada tema minggu Paska IV, maka hanya 31 tema yang dibandingkan dan dipergunakan sebagai acuan.

⁷ Model di atas mengadopsi bentuk ordo dalam tata liturgi yang bermuara pada pengutusan. Siklus berulang dalam ordo berhimpun di minggu selanjutnya. Pengutusan akan kembali pada perhimpunan. Lebih lanjut, J.B. Banawiratma sebagaimana dipaparkan E.G. Singgih (2000, 17), menandakan bahwa liturgi tidak dapat dipisahkan dari diakonia. Penulis mengusulkan agar liturgi juga tidak dilepaskan dari koinonia dalam pemahaman jalinan persekutuan antarmanusia lintas iman serta realitas *non-humane* yang dibangun pasca pengutusan dan dirayakan dalam perhimpunan.

⁸ Dalam pemaparannya tentang pemikiran Kwok Pui Lan, E.G. Singgih (2009, 137) menyatakan bahwa secara tradisional Alkitab (dipahami) berbicara kepada komunitas, namun dalam pendekatan *talking book*, komunitas berbicara mengenai Alkitab di dalam diskursus di antara mereka sendiri (penekanan *italic* sesuai asli). Nampak kesejajaran antara kedua pendekatan yang sama-sama dimulai dari realitas hidup umat.

⁹ Dalam tabel berikut terlihat tema bulanan pertama dibuat untuk Januari-Februari, sedangkan tema-tema selanjutnya untuk Maret, April dan seterusnya.

Utama	Bulanan	Tema
		Mingguan
PARTICIPATO	Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang	Lihatlah Sekelilingmu
		Menjadi Berkat
		Tuhan Tidak Diskriminatif
		Menegakkan Keadilan
		Kepedulian Seorang Perwira
		Dibebaskan dan Membebaskan
		Antara Simpati dan Empati
	Kritik Yang Membangun	
	Yesus di Tengah Masyarakat	Yesus Anak Tukang Kayu
		Yesus Blusukan
Yesus Memilih Rakyat Jelata		
Yesus Memberi Makan		
		<i>The Compassion of Christ</i>
Kemenangan Yesus	Juruselamat Semua Bangsa	
	Sengsara Dunia: Sengsara Yesus	
	Korban menjadi Kurban	
	Benar, Ia Bangkit	
Gereja di Tengah Masyarakat	Gereja adalah Kita	
	Oikumene	
	Gereja di Tengah Dunia	
	Bangga Menjadi GKI	
Roh Kudus Pemulih Ciptaan	Roh Kudus Pembaru Ciptaan	
	Lestari Alamku	
	<i>Reduce, Reuse, Recycle, Replace</i>	
	Energi Terbarukan	